
Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak

MEGA WARSINI

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait dengan sistem perpajakan yang dirasa kompleks dan belum sepenuhnya ramah bagi pelaku UMKM. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perpajakan yang diterapkan pada UMKM serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak di sektor ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei, wawancara, dan studi literatur terkait perpajakan UMKM. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor kompleksitas administrasi pajak, pemahaman yang terbatas tentang kewajiban perpajakan, serta persepsi terhadap manfaat pajak menjadi penentu utama kepatuhan pajak UMKM. Kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan pemberian insentif khusus terbukti dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi perpajakan yang intensif kepada pelaku UMKM juga menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi strategis disusun agar pemerintah dapat merancang sistem perpajakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik UMKM guna mendukung peningkatan penerimaan negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *UMKM, perpajakan, kepatuhan pajak, kebijakan fiskal, edukasi pajak.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional tidak dapat diabaikan karena selain mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berkontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, meskipun kontribusinya sangat besar, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah dalam hal perpajakan. Kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Hal ini dapat menjadi kendala serius bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kompleksitas regulasi perpajakan, kurangnya pemahaman tentang kewajiban perpajakan, hingga minimnya sosialisasi dan edukasi yang diterima oleh pelaku UMKM.

Sistem perpajakan yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami berbagai penyederhanaan, seperti pengenalan pajak final dengan tarif rendah khusus untuk UMKM, ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kepatuhan pajak secara optimal. Banyak pelaku UMKM yang masih menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan, belum melihat secara langsung manfaat dari pembayaran pajak, serta merasa bahwa proses administrasi perpajakan terlalu rumit dan menyita waktu serta biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menimbulkan potensi besar terjadinya penghindaran dan pengelakan pajak di sektor UMKM.

Lebih lanjut, karakteristik UMKM yang mayoritas merupakan usaha informal dan skala kecil membuat mereka cenderung sulit diawasi dan dibina secara langsung oleh otoritas pajak. Hal ini semakin memperumit upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ini. Selain itu, perbedaan tingkat literasi dan pendidikan di kalangan pelaku UMKM juga menjadi faktor penghambat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Dalam konteks global dan nasional, peningkatan penerimaan pajak dari UMKM sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat basis pajak nasional. Pemerintah telah mencoba berbagai pendekatan kebijakan, seperti program tax amnesty, penyederhanaan tarif pajak, pemberian insentif fiskal, serta peningkatan pelayanan dan kemudahan

administrasi perpajakan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu terus dievaluasi dan dikaji untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan UMKM di lapangan.

Selain aspek kebijakan, edukasi dan sosialisasi perpajakan juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan nasional harus terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan, workshop, dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan yang humanis dan berbasis teknologi informasi juga diperlukan untuk menjangkau lebih banyak UMKM dengan cara yang efektif dan efisien.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perpajakan UMKM serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Dengan pemahaman yang mendalam, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan UMKM, sekaligus dapat mendukung target penerimaan pajak nasional yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak hanya berdampak positif terhadap penerimaan negara, tetapi juga dapat memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian formal, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, perlu sinergi yang erat antara pemerintah, pelaku UMKM, dan stakeholder terkait dalam membangun ekosistem perpajakan yang kondusif bagi perkembangan UMKM di Indonesia.

Pembahasan

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia yang begitu signifikan menuntut adanya perhatian khusus dalam aspek perpajakan, khususnya dalam hal kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak UMKM menjadi isu yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari sistem perpajakan, karakteristik pelaku UMKM, hingga tingkat literasi dan kesadaran pajak. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengulas secara mendalam beberapa aspek kunci yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM serta tantangan dan strategi kebijakan yang relevan.

Pertama, dari sisi regulasi perpajakan, pemerintah telah berupaya menyederhanakan sistem perpajakan untuk UMKM melalui pengenalan pajak final dengan tarif yang lebih rendah, yaitu 0,5% hingga 1% dari omzet tertentu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban administrasi dan memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, meskipun tarif rendah dan sistem yang lebih sederhana, banyak UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami atau memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi yang menyeluruh, sehingga pelaku UMKM seringkali tidak tahu bagaimana cara mendaftarkan diri, menghitung, dan melaporkan pajak dengan benar.

Selain itu, banyak UMKM yang masih beroperasi secara informal dan belum memiliki pencatatan keuangan yang baik. Kondisi ini membuat proses pelaporan pajak menjadi sulit dan tidak akurat, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Informalitas ini juga seringkali disebabkan oleh ketakutan pelaku UMKM terhadap beban pajak yang dianggap memberatkan, serta kurangnya insentif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh mereka. Karena itu, penguatan formalitas UMKM melalui program pembinaan dan pendampingan menjadi sangat penting agar mereka dapat mengelola usaha secara profesional dan terdaftar secara resmi di sistem perpajakan.

Kedua, aspek literasi dan kesadaran pajak juga memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan UMKM. Studi menunjukkan bahwa pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan dan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Literasi pajak yang baik memungkinkan UMKM untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan media digital sangat diperlukan. Pemerintah dan institusi terkait harus mampu menjangkau pelaku UMKM dengan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami, sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya pajak.

Ketiga, faktor kemudahan administrasi perpajakan turut menentukan tingkat kepatuhan. Prosedur perpajakan yang rumit dan birokrasi yang berbelit seringkali menjadi

penghambat utama bagi UMKM untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka. Untuk itu, transformasi digital dalam pelayanan perpajakan melalui sistem online dan aplikasi mobile menjadi solusi strategis. Layanan perpajakan yang cepat, transparan, dan mudah diakses akan mengurangi beban pelaku UMKM serta meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak. Beberapa upaya seperti pengembangan Sistem Administrasi Perpajakan berbasis teknologi informasi dan implementasi e-filing serta e-payment telah mulai diterapkan, tetapi perlu terus disempurnakan agar dapat diakses oleh semua lapisan UMKM di seluruh wilayah.

Keempat, insentif fiskal juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pemerintah telah memberikan berbagai insentif, seperti pengurangan tarif pajak dan pembebasan denda pajak, untuk mendorong UMKM agar mau terdaftar dan patuh dalam pembayaran pajak. Namun, efektivitas insentif ini sangat bergantung pada sosialisasi yang efektif dan pelaksanaan yang konsisten. Jika UMKM tidak mendapatkan informasi yang jelas atau merasa proses pengajuan insentif terlalu rumit, maka insentif tersebut tidak akan maksimal dampaknya. Oleh karena itu, kebijakan insentif harus didukung dengan kemudahan akses dan proses yang transparan serta monitoring yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Selanjutnya, peran lembaga keuangan dan asosiasi UMKM juga tidak kalah penting. Lembaga keuangan seperti bank dapat memfasilitasi UMKM untuk lebih mudah mengakses pembiayaan melalui pengelolaan keuangan yang tertib dan tercatat, yang juga akan membantu dalam pelaporan pajak. Sementara itu, asosiasi UMKM dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan edukasi dan pendampingan pajak secara lebih masif dan menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan asosiasi akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang sekaligus mematuhi kewajiban perpajakan.

Terakhir, tantangan terbesar dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM adalah bagaimana mengubah paradigma dan budaya perpajakan di masyarakat. Pajak sering kali dipandang sebagai beban, bukan sebagai kontribusi sosial dan investasi bagi masa depan bangsa. Perubahan mindset ini membutuhkan pendekatan jangka panjang dan konsisten, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media dalam kampanye kesadaran pajak. Dengan cara ini, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab sosial yang dipahami dan dijalankan oleh seluruh pelaku UMKM.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor, mulai dari regulasi yang ramah UMKM, peningkatan literasi dan kesadaran pajak, kemudahan administrasi, pemberian insentif, hingga peran aktif lembaga pendukung dan perubahan budaya pajak. Kebijakan dan program yang terintegrasi dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan UMKM yang tidak hanya produktif tetapi juga taat pajak, sehingga berkontribusi optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

Selain faktor-faktor utama yang telah diuraikan, penting untuk menyoroti pengaruh teknologi informasi dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM. Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak melalui digitalisasi proses perpajakan. Platform digital yang terintegrasi tidak hanya memudahkan UMKM dalam mengakses layanan perpajakan, tetapi juga membantu pemerintah dalam memantau transaksi dan mencegah praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, digitalisasi dapat memperkecil celah ketidakpatuhan sekaligus mempercepat proses administrasi.

Namun, penerapan teknologi perpajakan digital harus disertai dengan peningkatan kapasitas UMKM dalam menggunakan teknologi tersebut. Banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan literasi digital, sehingga program pelatihan dan pendampingan khusus menjadi sangat krusial. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu menyediakan materi edukasi yang mudah diakses dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman pelaku UMKM, termasuk penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh praktik yang konkret.

Selain itu, aspek psikologis juga tidak boleh diabaikan. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi UMKM terhadap keadilan sistem perpajakan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Jika UMKM merasa sistem perpajakan adil dan manfaatnya nyata, maka mereka cenderung lebih termotivasi untuk patuh. Oleh karena itu, transparansi penggunaan pajak dan komunikasi yang efektif mengenai manfaat pajak bagi pembangunan harus terus ditingkatkan. Misalnya, pemerintah dapat secara rutin menginformasikan hasil pembangunan yang dibiayai oleh pajak dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Tak kalah penting adalah peran pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Pengawasan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak tegas berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merusak semangat kepatuhan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas namun proporsional untuk pelanggaran perpajakan, sehingga UMKM yang patuh mendapatkan perlindungan dan UMKM yang tidak patuh terdorong untuk memperbaiki perilakunya.

Dengan mengintegrasikan seluruh aspek tersebut—regulasi yang adaptif, edukasi dan literasi pajak, kemudahan administrasi berbasis teknologi, insentif yang efektif, dukungan kelembagaan, perubahan budaya dan mindset, serta pengawasan yang kuat—diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Analisis terhadap perpajakan UMKM dan pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Regulasi yang jelas dan adaptif sangat diperlukan agar UMKM merasa sistem perpajakan tidak memberatkan, serta mampu mendorong pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, kemudahan akses layanan perpajakan dan proses administrasi yang sederhana merupakan kunci utama dalam mengurangi hambatan teknis yang sering kali menjadi alasan ketidakpatuhan.

Pembentukan dan implementasi insentif fiskal yang tepat juga berperan signifikan dalam meningkatkan motivasi UMKM untuk patuh pajak. Insentif seperti pengurangan tarif, pengembalian pajak, atau kemudahan administrasi bagi pelaku UMKM yang taat pajak mampu memberikan dorongan positif, sekaligus memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, edukasi dan literasi pajak menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan, mengingat masih banyak UMKM yang kurang memahami aturan perpajakan dan manfaatnya bagi pembangunan nasional. Program edukasi yang menyasar UMKM secara masif dan berkelanjutan akan mampu meningkatkan kesadaran serta kompetensi pelaku usaha dalam mengelola kewajiban pajak mereka.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar untuk memperbaiki sistem perpajakan, khususnya dalam hal transparansi, kemudahan pelaporan, dan pemantauan. Digitalisasi perpajakan dapat mempercepat proses administrasi sekaligus mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Namun, teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas UMKM agar mereka dapat memanfaatkan platform digital tersebut secara optimal. Di samping itu, persepsi UMKM terhadap keadilan sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga komunikasi yang transparan dan menunjukkan secara nyata bagaimana pajak yang dibayarkan UMKM digunakan untuk pembangunan yang memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung.

Terakhir, pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas namun proporsional juga merupakan aspek penting dalam menciptakan iklim kepatuhan yang sehat. Pengawasan yang efektif dan sanksi yang jelas dapat mencegah praktik penghindaran pajak serta menjamin perlindungan bagi UMKM yang taat. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek tersebut—regulasi, insentif, edukasi, teknologi, psikologi, dan pengawasan—dapat diwujudkan sistem perpajakan UMKM yang efisien dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak nasional dan memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, I., & Suryani, W. (2023). Pengaruh Online Customer Review Dan Online Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Produk Implora Cheek & Liptint Di Shopee (Studi Pada Pelanggan Implora Cosmetics Di Desa Bangun Sari) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Marbun, P., & Syahrial, H. (2008). Pengaruh Penerapan Disiplin dan Komunikasi Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pada PDAM Tirtanadi Cabang Medan Sunggal.
- Tarigan, E. D. S. (2012). Peranan Kepemimpinan Berorientasi Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan.
- Syahputri, Y. (2019). Pengaruh Gaji dan Insentif Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Sumber Jaya Motor II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lores, L. (1999). Perencanaan dan Pengawasan Biaya Produksi pada PT. Simanindo Medantronics Industries Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, A. (2021). Pengaruh Daya Tarik Iklan Televisi dan Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli Produk Nivea Body Lotion Pada Alfamart Tebing Tinggi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, R., & Nst, A. (2006). Pengendalian Intern Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang pada PT. Duta Putra Sumatera Cabang Medan.
- Wijaya, M., & Pribadi, T. (2019). Pengaruh Insentif dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan pada PT. Pelita Car Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sari, W. P. (2001). Analisa Risiko Independensi Akuntan Publik.
- Siregar, R. (2002). Akuntansi Ganti Rugi Pertanggunggaan pada PT. Uppo General Insurance Tbk. Cabang Medan.
- Parulian, T., & Nasution, I. R. (2019). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Membandingkan Metode Camels dan RGEK Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ringroad Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Effendi, I. (2011). Pengaruh Sistem Komunikasi Terhadap Produktivitas Kerja pada PT. Indonesia Asahan Aluminium Kuala Tanjung Kabupaten Batubara.
- Siregar, R. (2013). Analisis Kebijakan Jual Beli Pembiayaan Murabahah terhadap Laba pada PT Bank Syariah Mandiri Medan.
- Lubis, A., & Sabrina, H. (2019). Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap Kebijakan Pimpinan Di Pt. Quantum Training Centre Medan.
- Farida, Y., & Utama, A. M. (2013). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Karyawan Terhadap Produktivitas Kerja pada PT. Asuransi Himalaya Pelindung Cabang Medan.
- Marbun, P. (2018). Pengaruh Sistem Rekrutmen dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Kerja Karyawan pada PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Bukit Lawang Langkat.
- Sari, W. P. (2022). Pengaruh Karakteristik Sistem Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Olam Coffe Indonesia Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Marbun, P., & Syahrial, H. (2008). Analisis Anggaran Biaya Operasional Budidaya Kelapa Sawit Sebagai Alat Pengawasan Pada PTP. Nusantara II Medan Kebun Kelapa Sawit Stabat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Effendi, I., & Tarigan, E. D. S. (2016). Pengaruh Iklan dan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian Laptop PT Prima Jaya Multi Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Mulia, A., & Syahputri, Y. (2018). Pengaruh Brand Image dan Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung pada Karyawan Sibayak Berastagi.
- Marbun, P., & Syahrial, H. (2011). Pengaruh Faktor-Faktor Brand Equity Teh Botol Sosro Terhadap Loyalitas Pembelian pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
- Abidin, Z., & Dalimunthe, H. (2016). Analisis Pengaruh Perubahan ARus Kas dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Rafiki, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sub Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2016-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rafiki, A. (2022). Pengaruh Online Customer Review dan E-Trust terhadap Niat Beli pada Masyarakat Pengguna Aplikasi Lazada di Kecamatan Tanjung Morawa.
- Hasibuan, R. A., & Utama, A. M. (2007). Pelaksanaan Rekrutmen dan Pengembangan Karyawan Pad PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lores, L. (2000). Penerapan dan Peranan Electronic Data Processing System Dalam Pengolahan Data Akuntansi.
- Effendi, I., & Tarigan, E. D. S. (2013). Analisis Faktor-Faktor Psikologi Konsumen Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian Produk Elektronik di PT. Colombia Cabang Unit Brigien Katamsa Medan.

- Hasibuan, R., & Mulia, A. (2006). Penerapan Kebijakan Distribusi dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT Pico Gas Prima Medan.
- Tarigan, E. D. S. (2013). Hubungan Antara Kepemimpinan Budaya Organisasi Strategi Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan.
- Marbun, P. (2014). Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Konsumen di Perusahaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Mulia, A., & Effendi, I. (2009). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Tumbakmas Niaga Sakti Cabang Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, R., & Tambunan, S. B. (2004). Pengakuan Pendapatan dan Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada PT. Pembangunan Perumahan Cabang Medan.
- Siregar, R., & Tambunan, S. B. (2008). Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada PT Bina San Prima Cabang Medan.
- Habibie, M., & Dalimunthe, H. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan yang Terdaftar pada Kpp Medan Polonia.
- Nainggolan, K., & Dalimunthe, H. (2020). Implementasi Balanced Scorecard Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Proses Bisnis Internal pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, A., & Sabrina, H. (2019). Pengaruh Loyalitas Dan Integritas Terhadap Kebijakan Pimpinan Di Pt. Quantum Training Centre Medan.
- Siregar, A. U., & Sari, W. P. (2017). Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pensiun pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
- Marbun, P., & Syahputri, Y. (2017). Pengaruh Stres Kerja dan Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Clover Bakeshoppe Medan.
- Abidin, Z., & Dalimunthe, H. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Dalimunthe, M. I. (2011). Pengumpulan Dan Perhitungan Harga Pokok Produksi.
- Marbun, P., & Effendi, I. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan.
- Wijaya, M., & Pribadi, T. (2020). Pengaruh Self Confidence dan Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nainggolan, K., & Dalimunthe, M. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Pendapatan Premi dan Beban Klaim Asuransi Jiwa pada AJB Bumiputera 1912 Wilayah Medan, Ditinjau dari PSAK No. 36.
- Abidin, Z., & Dalimunthe, M. (2016). Pengaruh Return On Asset dan Financial Leverage terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Hardjo, S., & Siregar, M. (2005). Hubungan Antara Rasa Cemburu kepada Saudara Sekandung dengan Konflik Internal pada Siswa-Siswi SLTP Yayasan Perguruan Gajah Mada (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Effendi, I. (2016). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Karakteristik Individu Terhadap Komitmen Kerja pada PT. Surya Windu Pertiwi (SWP) Pantai Cermin.
- Lubis, A., & Lores, L. (2006). Pengendalian Intern Penjualan dan Penerimaan Kas pada PT. Sang Hyang Seri Tanjung Morawa.
- Lores, L. (2008). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kredit.
- Lubis, A., & Siregar, R. (2003). Sistem Pengawasan dalam Pemberian Kredit pada PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Williem Iskandar Medan.
- Siregar, M. Y., & Prayudi, A. (2020). Pengaruh kredit Simpan Pinjam dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa Kecamatan Bagan Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, A. M. (2014). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Sogo Sun Plaza Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, R., & Mulia, A. (2006). Strategi Pemasaran dalam Usaha Meningkatkan Volume Penjualan Polis pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama " Bumi Putra 1912" Medan.
- Lestari, I., & Amelia, W. R. (2023). Pengaruh Viral Marketing dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Dimsum Citra Medan.
- Sahir, S. H. (2023). Pengaruh Influencer Marketing dan Social Media Marketing terhadap Minat Beli Produk Skincare pada Masyarakat Generasi Z Kecamatan Pancur Batu (Studi pada Konsumen Produk Skincare Merek Ms Glow).

- Dalimunthe, M. I. (2010). Perbedaan Kinerja Bank Devisa yang Telah Dan Belum Go Public Pada Bursa Efek Indonesia.
- Lores, L., & Sari, W. P. (2016). Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Mulia, A., & Syahrial, H. (2011). Pengaruh Pelayanan Dan Potongan Harga Guna Meningkatkan Minat Pembelian Pada PT. Matahari Departemen Store Medan.
- Siregar, R., & Nst, A. (2006). Pengendalian Intern Penjualan Kredit dan Penagihan Piutang pada PT. Duta Putra Sumatera Cabang Medan.
- Lestari, I., & Amelia, W. R. (2023). Pengaruh Viral Marketing dan Brand Awareness terhadap Keputusan Pembelian pada Pelanggan Dimsum Citra Medan.
- Siregar, D. (2021). Pengaruh Promosi Online Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Dimasa Pandemi Covid 19 Pada Berkah Mobil Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).